

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KEMANTREN DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Dwi Irawan Jati

NPP. 32.0485

*Asdaf Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [dwiirawanjatii@gmail.com](mailto:dwiirawanjatii@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Sarwani, M.Ag

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Waste management problems in urban areas such as Yogyakarta City continue to be a serious challenge even though many policies have been issued. One of the main gaps in this study is the suboptimal role of the Sub-District Government in implementing waste management policies, especially after the closure of the Piyungan TPA which gave rise to illegal dumping. **Purpose:** This study aims to evaluate the waste management policy of the Umbulharjo Sub-District Government of Yogyakarta City. **Method:** This study uses a qualitative descriptive approach with informants from the Umbulharjo Sub-District Government and the Yogyakarta City Environmental Service. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. This study uses Dunn's (2003) policy evaluation theory with six dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. **Result:** The results of the study indicate that the waste management policy has not been running optimally. This is indicated by limited budget allocation, low community participation, minimal number of workers and waste management facilities. Other inhibiting factors are the lack of public awareness and inadequate facilities and infrastructure. Improvement efforts are carried out through socialization, proposals for additional personnel and facilities, and collaboration with the Yogyakarta City Environmental Service. **Conclusion:** The Umbulharjo Sub-district Government needs to increase comprehensive socialization to the community, allocate funds proportionally, and strengthen cross-agency collaborative strategies to address sustainable waste management problems.

**Keywords:** Evaluation, Policy, Waste Management, Umbulharjo.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta terus menjadi tantangan serius meskipun telah banyak kebijakan diterbitkan. Salah satu gap utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Pemerintah Kemantren dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah, khususnya pasca penutupan TPA Piyungan yang memunculkan pembuangan ilegal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan dari Pemerintah Kemantren Umbulharjo dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn (2003) dengan enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan,

pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terbatasnya alokasi anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya jumlah tenaga kerja dan fasilitas pengelolaan sampah. Faktor penghambat lainnya ialah kurangnya kesadaran masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Upaya perbaikan dilakukan melalui sosialisasi, pengusulan penambahan tenaga dan sarana, serta kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. **Kesimpulan:** Pemerintah Kemantren Umbulharjo perlu meningkatkan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, mengalokasikan dana secara proporsional, dan memperkuat strategi kolaboratif lintas instansi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Evaluasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Umbulharjo.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu kompleks yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Sampah tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Persoalan ini menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan terencana dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pernyataan Wahdatunnisa (2016) yang menyebutkan bahwa sampah merupakan persoalan kebiasaan yang memiliki dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Implementasi prinsip circular economy dalam pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mengurangi timbulan sampah secara signifikan melalui pemilahan dan daur ulang yang terstruktur (Mulyani *et al.*, 2024).

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan tren peningkatan timbulan sampah secara nasional dari tahun ke tahun, dengan volume mencapai 38 juta ton pada tahun 2023. Fenomena ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas masyarakat, perubahan gaya hidup, dan pertumbuhan populasi (Kahfi, 2017).

Yogyakarta sebagai kota besar juga mengalami permasalahan serupa. Meskipun telah diterapkan kebijakan pengelolaan seperti gerakan Zero Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, implementasinya belum optimal. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah serta rendahnya partisipasi masyarakat. Provinsi D.I. Yogyakarta bahkan menempati urutan ke-13 sebagai penghasil sampah terbanyak dari 38 provinsi di Indonesia.

Pemerintah Kemantren memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di wilayahnya. Di Kemantren Umbulharjo, upaya yang telah dilakukan antara lain mencakup pengangkutan sampah, edukasi masyarakat, pembentukan bank sampah, dan kerja sama lintas sektor. Namun, penutupan TPA Piyungan sejak Mei 2024 memperburuk situasi dengan meningkatnya volume sampah yang tidak tertangani dan munculnya tempat pembuangan ilegal.

Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya serta terbatasnya infrastruktur pengelolaan, seperti TPS3R yang tidak beroperasi maksimal, menambah kompleksitas masalah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Pemerintah Kemantren, khususnya di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas

kebijakan, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta merumuskan upaya perbaikan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Yogyakarta, telah menjadi perhatian banyak pihak, baik akademisi maupun praktisi. Sejumlah studi terdahulu telah mengangkat isu peran pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun komunitas dalam mengelola sampah dengan pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, kebanyakan penelitian lebih berfokus pada aspek implementasi program atau keterlibatan masyarakat tanpa memberikan penekanan pada evaluasi sistematis terhadap kebijakan pemerintah di tingkat kemantren sebagai pelaksana teknis pemerintahan kewilayahan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kemantren memiliki peran strategis dalam merealisasikan kebijakan daerah secara teknis dan administratif (Hamid, 2018).

Sementara itu, dalam konteks pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo, terdapat berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan seperti pengangkutan rutin, pembentukan bank sampah, sosialisasi pemilahan, serta kolaborasi dengan pihak ketiga. Namun, permasalahan masih muncul secara berulang seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan tenaga dan infrastruktur, serta belum maksimalnya penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan hasil pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan pada tahun 2024 telah menciptakan krisis pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, termasuk di Kemantren Umbulharjo. Kebijakan pengelolaan yang sebelumnya dirancang belum mampu merespons kondisi darurat ini secara adaptif dan menyeluruh. Hal ini mempertegas kebutuhan akan evaluasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas program, tetapi juga mencakup dimensi efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2003).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana bentuk evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo dalam pengelolaan sampah. Kedua, apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Kesenjangan penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian evaluatif yang disusun secara sistematis terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah kemantren, khususnya sebagai unit pelaksana teknis yang berada pada level administratif lokal. Padahal, peran kemantren sangat strategis dalam menerjemahkan kebijakan lingkungan yang lebih luas ke dalam bentuk pelaksanaan yang nyata di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara empiris maupun konseptual dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah dirancang mampu menjawab permasalahan pengelolaan sampah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahira (2025) mengulas evaluasi kebijakan pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sumenep. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis kebijakan melalui pendekatan evaluatif terhadap efektivitas dan koordinasi antarlembaga. Temuan menunjukkan bahwa meskipun perumusan kebijakan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan banyak pihak, implementasinya masih menghadapi kendala kelembagaan, khususnya dalam hal konsistensi pelaksanaan. Relevansi dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluasi kebijakan yang juga menjadi kerangka dalam penelitian ini, meskipun objek dan sektor kebijakan yang diteliti berbeda.

Arfan (2023) meneliti peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menekankan fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam mencapai pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan. Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* masih belum berjalan optimal akibat lemahnya pelaksanaan regulasi yang berlaku. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan pengelolaan sampah, meskipun belum menitikberatkan pada evaluasi mendalam terhadap struktur pelaksana kebijakan di tingkat kelurahan atau kemantren.

Penelitian oleh Sibun (2023) membahas pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pendekatan 3R di Desa Bentek, Lombok Utara. Penelitian ini menggambarkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat lokal mampu meningkatkan efektivitas pengolahan sampah, khususnya jenis organik dan anorganik yang mudah didaur ulang. Penekanan utama dalam penelitian ini adalah pentingnya partisipasi komunitas dan keberlanjutan program berbasis kebutuhan masyarakat. Meskipun tidak berfokus pada evaluasi kebijakan secara formal, penelitian ini memberikan gambaran yang komplementer terkait upaya pengelolaan sampah yang partisipatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Tadasi & Choiriyah (2023) yang mengkaji peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan. Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai motivator dan fasilitator dalam mengedukasi masyarakat melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Peran aktif pemerintah desa mendorong kesadaran warga dalam mengelola sampah secara mandiri. Penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan kultural dan edukatif dalam penanganan masalah lingkungan di tingkat lokal, meskipun belum memberikan penilaian sistematis terhadap indikator keberhasilan kebijakan yang digunakan.

Sementara itu, Hulu (2023) mengevaluasi kinerja pemerintah desa di Kabupaten Nias Utara dari aspek produktivitas, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya kedisiplinan aparatur desa berdampak pada efektivitas pelaksanaan berbagai program, termasuk yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Studi ini menyoroti pentingnya kapasitas aparatur pemerintah dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Namun demikian, studi ini belum secara khusus membahas pengelolaan sampah maupun mengevaluasi kebijakan dari sisi sistematis dan sektoral seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang evaluasi kebijakan dan pengelolaan sampah. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran pemerintah desa serta pemerintah daerah secara umum dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah atau kebijakan publik lainnya, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji evaluasi kebijakan pada tingkat kemantren. Padahal, kemantren merupakan entitas pemerintahan yang memiliki peran operasional penting dalam menerjemahkan kebijakan daerah ke dalam implementasi teknis di wilayah kewenangannya. Hal serupa juga ditemukan dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo yang menunjukkan peran penting struktur pemerintahan lokal dalam menjawab tantangan teknis dan sosial secara bersamaan (Kakilo *et al.*, 2023).

Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada fokus evaluasi kebijakan secara sistematis yang dilakukan terhadap Pemerintah Kemantren Umbulharjo dalam pengelolaan sampah, dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang

mencakup enam dimensi (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menilai kinerja secara umum, tetapi juga mengidentifikasi aspek-aspek spesifik yang menjadi kekuatan maupun kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Selain itu, konteks kekinian yang diangkat, yakni penutupan TPA Piyungan dan dampaknya terhadap sistem pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, menjadikan penelitian ini relevan dan aktual. Belum ditemukan penelitian sebelumnya yang meneliti secara langsung dampak kebijakan pasca-penutupan TPA terhadap strategi pengelolaan sampah oleh kemantren, termasuk bagaimana upaya kolaboratif dan penyesuaian dilakukan oleh pemerintah lokal dalam mengatasi krisis pengelolaan sampah.

Dengan demikian, penelitian ini menyajikan kontribusi ilmiah yang baru dalam bentuk objek kajian yang belum banyak dibahas (pemerintah kemantren), pendekatan evaluatif yang komprehensif, serta konteks permasalahan yang bersifat kontemporer. Kebaruan ini diharapkan dapat memperkaya literatur studi kebijakan publik serta menjadi acuan bagi penelitian lanjutan dan perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan lokal.

### **1.5. Tujuan**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta dampak dari upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara utuh fenomena sosial yang kompleks, termasuk dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, interaksi antarpemangku kepentingan, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Penelitian ini difokuskan pada upaya evaluatif untuk mengkaji efektivitas kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar mengukur capaian secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif cocok digunakan dalam studi pemerintahan karena mampu menggambarkan realitas sosial dan hubungan antar aktor secara lebih mendalam (Simangunsong, 2019).

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, sementara data sekunder didapat dari berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta laporan kegiatan yang relevan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah aparatur Pemerintah Kemantren Umbulharjo dan pejabat fungsional dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan tanggung jawab langsung dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Selain itu, tokoh masyarakat, pengelola bank sampah, dan warga setempat juga dilibatkan sebagai informan pendukung guna memperoleh pandangan yang lebih komprehensif. Metodologi penelitian kebijakan publik menekankan pentingnya triangulasi data dan partisipasi multi-aktor dalam proses pengumpulan informasi (Kurniawan, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di wilayah administratif Kemantren Umbulharjo dan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2017), penggunaan model Miles dan Huberman merupakan strategi analisis yang umum dalam penelitian sosial yang bersifat deskriptif-kualitatif. Sebagai landasan teoretis, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang mencakup enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah telah dilaksanakan secara optimal, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun potensi perbaikannya ke depan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal secara holistik. Penelitian ini berlandaskan teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Sebelum pengumpulan data, peneliti mengkaji berbagai regulasi seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan kunci dari aparaturnya Kemantren Umbulharjo, pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pengelola bank sampah, dan tokoh masyarakat, yang dipilih karena memiliki peran langsung dan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di wilayah Kemantren Umbulharjo dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta disajikan secara deskriptif melalui narasi dan kutipan langsung dari informan.

#### **3.1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Keberhasilan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dianalisis dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dinyatakan oleh William Dunn (2003) yang mempunyai enam variabel yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari masing-masing variabel dari teori tersebut akan dijabarkan lagi menjadi beberapa indikator untuk melihat evaluasi peran dari kebijakan tersebut

##### **a. Efektivitas**

Efektivitas merupakan salah satu dimensi penting dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Efektivitas menilai sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dalam penelitian ini, efektivitas dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu kondisi sesudah pelaksanaan kebijakan, penerapan kebijakan, dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh sejauh mana implementasi mampu mengubah perilaku dan kondisi masyarakat sasaran secara signifikan (Purwanto, 2018).

Indikator kondisi sesudah mencerminkan perubahan yang terjadi pasca pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya pemerintah dan masyarakat, diketahui bahwa kebijakan pengelolaan sampah telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah dan pengurangan volume sampah ke depo. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum peduli terhadap persoalan sampah, sehingga dampak yang diharapkan belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat secara merata.

Indikator penerapan menunjukkan bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik. Informasi dari pihak kemantren mengindikasikan bahwa pegawai pemerintah telah berupaya maksimal dalam menjalankan kebijakan karena adanya tuntutan tugas. Namun demikian, efektivitas di tingkat masyarakat belum dapat sepenuhnya diukur, mengingat penerapan secara menyeluruh baru akan dievaluasi pada akhir tahun 2025. Beberapa warga juga menilai bahwa meskipun pemerintah sudah aktif melakukan penerapan kebijakan, masih banyak kendala, terutama dari rendahnya kesadaran masyarakat.

Indikator target digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah kemantren menargetkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat sepenuhnya diterapkan dalam kurun waktu satu tahun, yakni sepanjang tahun 2025, dengan hasil yang dapat dirasakan pada tahun 2026. Selain itu, target substansial lainnya meliputi pengurangan timbulan sampah, peningkatan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun demikian, karena implementasi masih berlangsung, pencapaian target belum dapat dinilai secara final.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo menunjukkan adanya progres positif, terutama dari sisi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Namun, keberhasilan penuh dari kebijakan ini masih bergantung pada berjalannya penerapan secara konsisten dan terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang direncanakan. Oleh karena itu, evaluasi lanjutan setelah tahun 2025 menjadi penting untuk menilai hasil akhir dari efektivitas kebijakan ini secara menyeluruh.

#### **b. Efisiensi**

Efisiensi merupakan salah satu dimensi utama dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah, yang berfokus pada kemampuan pemerintah dalam mencapai hasil yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks ini, efisiensi diukur dengan membandingkan antara input, seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja, dengan output yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan. Penilaian ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo telah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia tanpa pemborosan.

Indikator biaya menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.437.624.129 pada tahun 2023 untuk pengembangan pengelolaan sampah, dana tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan di setiap kemantren. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya lahan dan fasilitas seperti alat pencacah sampah. Pernyataan dari Sekretaris Lurah Sorosutan menegaskan bahwa kendala anggaran dan keterbatasan lahan menjadi tantangan dalam mewujudkan efisiensi biaya dalam pengelolaan sampah.

Indikator waktu menunjukkan bahwa Pemerintah Kemantren Umbulharjo telah menetapkan kerangka waktu pelaksanaan kebijakan selama satu tahun pada 2025, dengan

harapan hasilnya dapat terlihat pada tahun 2026. Penjadwalan ini mencerminkan upaya efisiensi dalam manajemen waktu dan pelaksanaan program. Meskipun demikian, efektivitas dari efisiensi waktu ini baru dapat dinilai sepenuhnya setelah program berjalan secara menyeluruh. Perencanaan waktu yang terukur ini juga menjadi dasar evaluasi lanjutan terhadap capaian program di kemudian hari.

Indikator tenaga mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja persampahan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus ditangani. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan hanya terdapat 275 tenaga kerja yang bertugas mengelola sampah di seluruh Kota Yogyakarta, termasuk di Kemantren Umbulharjo. Kepala Jawatan Kemakmuran menyatakan bahwa keterbatasan ini menjadi kendala utama, namun pemerintah telah mengusulkan penambahan tenaga sesuai dengan kemampuan anggaran. Kekurangan tenaga berdampak langsung terhadap efisiensi pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang belum tertangani secara optimal.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap dimensi efisiensi menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo belum sepenuhnya efisien dalam hal pembiayaan, pengelolaan waktu, dan pemanfaatan tenaga kerja. Kendala anggaran, keterbatasan infrastruktur, serta kekurangan sumber daya manusia menjadi tantangan utama yang perlu ditangani. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dalam ketiga aspek tersebut sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis komunitas seperti *community-driven material recovery facility* (CdMRF) terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan memberikan insentif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal (Budihardjo *et al.*, 2022).

### c. Kecukupan

Kecukupan merupakan dimensi evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil dari suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Dalam konteks evaluasi kebijakan pengelolaan sampah, kecukupan mengukur apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada secara menyeluruh. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kecukupan tidak hanya melihat tercapainya tujuan, tetapi juga mempertimbangkan apakah program telah memberikan manfaat yang memadai dan relevan bagi masyarakat sasaran serta membuka peluang penyelesaian masalah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Jawatan Kemakmuran Kemantren Umbulharjo dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa upaya penyusunan anggaran operasional pengelolaan sampah memang telah dilakukan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan di tiap wilayah kemantren. Namun, dalam pelaksanaannya, kecukupan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pengelolaan sampah di berbagai wilayah masih menunjukkan ketimpangan, dan kebutuhan dasar dalam hal sarana, tenaga, maupun dukungan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keseriusan dari pihak pemerintah, ketercukupan dari sisi sumber daya dan cakupan program masih menjadi tantangan utama.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo saat ini belum sepenuhnya mencukupi dalam menjawab seluruh kebutuhan pengelolaan secara merata. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian kebijakan yang lebih proporsional serta distribusi sumber daya yang lebih adil agar pelaksanaan kebijakan dapat memenuhi standar kecukupan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan stakeholder terkait.

#### **d. Kemerataan**

Dimensi Kemerataan merupakan dimensi penting dalam evaluasi kebijakan yang menyoroti sejauh mana hasil dan manfaat program didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah, pemerataan menilai apakah seluruh kalurahan dan lapisan masyarakat di wilayah Kemantren Umbulharjo memperoleh akses, fasilitas, dan informasi yang sama dalam mendukung perubahan perilaku pengelolaan sampah. Evaluasi pemerataan berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial serta pemerataan pelayanan publik agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam implementasi kebijakan.

Indikator tepat sasaran menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah telah dirancang dan dilaksanakan untuk menjangkau seluruh masyarakat di berbagai kalurahan secara menyeluruh. Pernyataan dari Mantri Pamong Praja dan Lurah Sorosutan menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi, baik melalui pertemuan langsung maupun media spanduk, dan memberikan fasilitas yang merata dalam upaya membentuk pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Upaya ini dinilai telah berjalan sesuai sasaran karena menysasar kelompok-kelompok masyarakat secara langsung dan tidak terbatas pada satu wilayah saja.

Indikator cakupan luas menegaskan bahwa kebijakan telah mencakup seluruh wilayah Kemantren Umbulharjo dengan pendekatan yang menyeluruh. Program edukasi, pemberian fasilitas, dan penyebaran informasi dilaksanakan secara merata di seluruh kalurahan, tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pernyataan dari informan menyebutkan bahwa kegiatan pemerintah ditujukan untuk menjangkau sebanyak mungkin warga, baik melalui jalur pemerintahan kalurahan maupun forum-forum kemasyarakatan, sehingga prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan kebijakan dapat terjaga.

Secara keseluruhan, evaluasi dimensi pemerataan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo telah memperhatikan aspek keadilan distribusi manfaat. Seluruh kalurahan di wilayah kemantren mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal edukasi dan fasilitas pendukung, sehingga kebijakan ini dinilai telah berjalan secara adil dan menyeluruh. Namun, pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pemerataan tersebut dapat dipertahankan dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan atau kurang terlayani.

#### **e. Responsivitas**

Responsivitas merupakan dimensi evaluatif yang menyoroti kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien. Dalam konteks pelayanan publik, responsivitas mencerminkan sejauh mana organisasi mampu menyediakan solusi yang relevan terhadap keluhan dan harapan masyarakat. Evaluasi terhadap responsivitas menjadi penting karena menunjukkan kesesuaian antara kebijakan yang dilaksanakan dengan kondisi riil di lapangan, serta menunjukkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

Indikator respon masyarakat digunakan untuk menilai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo. Berdasarkan hasil wawancara, respons yang diberikan masyarakat menunjukkan keragaman. Salah satu informan, Bapak Athalla Afif, menyatakan bahwa program pengelolaan sampah dinilai berguna meskipun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kekurangan. Di sisi lain, Bapak Edi Joko menunjukkan ketidaktahuan terhadap kebijakan pemilahan sampah dan mengakui masih membuang sampah sembarangan karena mengikuti kebiasaan lingkungan sekitar. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat memahami pentingnya program tersebut, masih ada segmen yang belum teredukasi dengan baik, sehingga menimbulkan respons yang pasif atau bahkan bertentangan dengan tujuan kebijakan. Penilaian responsivitas pemerintah juga dapat diperkuat melalui instrumen *Governance Assessment Tool* (GAT), yang telah digunakan secara efektif untuk mengevaluasi program pengurangan sampah berbasis komunitas di Makassar (Latanna *et al.*, 2023).

Secara keseluruhan, evaluasi dimensi responsivitas menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menjalankan kebijakan pengelolaan sampah, namun belum sepenuhnya direspons secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat celah dalam hal penyampaian informasi, pemahaman publik, serta internalisasi perilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, edukasi yang lebih intensif, dan pendekatan kultural yang menyentuh langsung perilaku masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan responsivitas publik terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **f. Ketepatan**

Ketepatan (atau ketetapan) dalam evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana hasil yang dicapai dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Dimensi ini menilai tidak hanya keberhasilan pencapaian target secara formal, tetapi juga dampak nyata dan manfaat berkelanjutan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah, ketepatan menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan program benar-benar memberikan perubahan positif yang relevan, serta apakah manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran utama.

Indikator hasil akhir menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah dijalankan sejak beberapa waktu lalu, penilaian secara menyeluruh terhadap hasil akhir belum sepenuhnya dapat dilakukan karena program masih dalam tahap penyesuaian. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa masih terjadi perubahan skema sebagai dampak dari proses desentralisasi pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Meski demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif berupa pengurangan masalah sampah, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Indikator berguna atau bernilai memperlihatkan bahwa program kebijakan ini dipandang bermanfaat oleh berbagai pihak. Kepala Jawatan Kemakmuran dan Lurah Sorosutan menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah mampu mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh masyarakat, termasuk Bapak Athalla Afif dan Bapak Dodo, yang merasakan manfaat langsung dari program ini meskipun pelaksanaannya belum sempurna. Ini menunjukkan bahwa meskipun implementasinya menghadapi beberapa kendala, kebijakan tersebut tetap memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mencerminkan kebermanfaatan yang nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap dimensi ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo telah memberikan dampak yang positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun hasil akhirnya belum dapat dinilai sepenuhnya karena program masih berjalan. Ketetapan hasil dan kebermanfaatan kebijakan ini menunjukkan bahwa program berada pada arah yang tepat, namun tetap membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan penguatan kelembagaan agar manfaat yang ada dapat ditingkatkan dan bertahan dalam jangka panjang.

Meskipun kebijakan pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo telah menunjukkan kemajuan dari sisi efektivitas, efisiensi, dan pemerataan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu keberlanjutan dan optimalisasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang menjadi penghambat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya tenaga kerja persampahan, tingginya volume timbulan sampah, terbatasnya lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta kurangnya dana pengelolaan. Rendahnya kesadaran masyarakat tercermin dari perilaku membuang sampah sembarangan dan minimnya pemahaman terkait pemilahan sampah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya responsivitas masyarakat terhadap kebijakan yang sudah disosialisasikan.

Selain itu, jumlah tenaga kerja persampahan yang tidak sebanding dengan volume sampah dan jumlah penduduk menjadikan proses pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak berjalan optimal. Masalah ini diperparah oleh besarnya volume timbulan sampah, yang tidak hanya berasal dari penduduk lokal tetapi juga wisatawan dan pendatang. Ketidakseimbangan antara kapasitas layanan dan beban sampah ini menunjukkan bahwa dimensi kecukupan belum sepenuhnya terpenuhi. Situasi ini juga berkaitan erat dengan dimensi efisiensi, karena kurangnya tenaga kerja dan fasilitas menyebabkan keterlambatan, pemborosan sumber daya, serta ketidaktercapaian target layanan.

Lebih lanjut, penutupan TPA Piyungan dan keterbatasan lahan di TPA Nitikan turut memperburuk situasi. Pemerintah dihadapkan pada tantangan struktural yang membutuhkan solusi jangka panjang dan kolaboratif. Terbatasnya anggaran menambah kompleksitas, mengingat dana sangat dibutuhkan untuk membiayai operasional tenaga kerja, pengadaan sarana, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan. Kondisi ini menegaskan bahwa pencapaian hasil akhir (dimensi ketepatan) tidak hanya tergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kecukupan dukungan anggaran dan manajemen sumber daya.

Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, Pemerintah Kemantren Umbulharjo telah mengambil sejumlah langkah, seperti menyelenggarakan sosialisasi secara masif melalui media luar ruang dan digital, menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup serta pemerintah provinsi untuk pengadaan sarana dan prasarana, serta mengusulkan penambahan tenaga kerja di sektor persampahan. Penganggaran operasional juga terus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya niat kuat untuk menjaga keberlanjutan kebijakan serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang dari program pengelolaan sampah. Namun demikian, tantangan tetap ada, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan selanjutnya.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga kerja, kurangnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil ini sejalan dengan temuan Arfan (2023) yang mengungkapkan bahwa lemahnya implementasi regulasi di tingkat lokal menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Sama halnya dengan studi Arfan (2023), penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah sebagai fasilitator yang belum sepenuhnya mampu menggerakkan partisipasi publik secara aktif dan menyeluruh. Dalam proses implementasi kebijakan, kekuatan institusional dan kapasitas birokrasi daerah menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program publik (Supriadi, 2019).

Berbeda dengan temuan Sibun (2023) yang menekankan keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Bentek Lombok Utara, penelitian ini justru menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif di Kemantren Umbulharjo belum sepenuhnya terinternalisasi di kalangan masyarakat. Kurangnya edukasi yang efektif dan perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan menjadi tantangan utama. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh karakteristik wilayah dan tingkat kedekatan sosial antara pemerintah dan warga yang lebih terbangun di desa dibandingkan kawasan urban seperti Yogyakarta.

Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari segi efisiensi, Pemerintah Kemantren Umbulharjo masih belum mampu mengoptimalkan anggaran dan sumber daya manusia secara maksimal. Hasil ini memperkuat temuan Hulu (2023) yang menunjukkan rendahnya kedisiplinan dan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelayanan publik. Meskipun konteks wilayah berbeda, baik penelitian Hulu maupun penelitian ini sama-sama menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

Temuan dalam penelitian ini juga memperlihatkan adanya responsivitas pemerintah yang cukup baik melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi yang masif, baik melalui media sosial maupun spanduk. Namun, hasilnya belum sepenuhnya dirasakan karena ketidaksesuaian antara strategi komunikasi dan kebutuhan pemahaman masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan terhadap penelitian Tadasi & Choiriyah (2023) yang menekankan pentingnya peran edukatif dan kultural dalam membangun kesadaran masyarakat. Kedua penelitian ini sama-sama menekankan bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan.

Secara umum, penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara sistematis di tingkat kemantren, yang belum banyak dijadikan fokus dalam studi-studi terdahulu. Jika penelitian Fahira (2025) hanya menitikberatkan pada aspek efektivitas dan koordinasi antarlembaga, maka penelitian ini lebih komprehensif dengan mengevaluasi enam dimensi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya terkait kendala kelembagaan dan partisipasi publik, tetapi juga memperluas cakupan analisis melalui pendekatan teoritis yang lebih menyeluruh dan mendalam. Kebaruan ini sekaligus memperkaya khasanah studi kebijakan publik di level pemerintahan lokal.

### **3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo dengan tingkat perubahan perilaku masyarakat. Meskipun berbagai bentuk edukasi telah dilakukan, mulai dari pemasangan spanduk, baliho, hingga video di media sosial, sebagian masyarakat masih belum menunjukkan kepedulian tinggi terhadap pemilahan dan pembuangan sampah yang benar. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi sosialisasi yang bersifat satu arah belum sepenuhnya efektif dalam menyentuh aspek kultural dan psikologis warga.

Selain itu, muncul peran penting fasilitator lingkungan dan tokoh masyarakat sebagai penghubung antara pemerintah dan warga. Walaupun tidak secara eksplisit dimuat dalam indikator evaluasi utama, keterlibatan mereka terbukti mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat kelurahan. Peran informal ini berpotensi besar dalam memperkuat partisipasi masyarakat karena lebih dekat secara sosial dan emosional, serta dianggap lebih dipercaya oleh warga. Keberadaan mereka menjadi faktor pendukung yang perlu diperhatikan dan diperkuat dalam kebijakan ke depan. Studi di Yogyakarta bahkan menunjukkan bahwa pendekatan action research mampu mengakselerasi peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berbasis komunitas (Mulasari *et al.*, 2024).

Temuan lain yang patut dicermati adalah belum optimalnya potensi ekonomi dari pengelolaan sampah, seperti melalui bank sampah dan TPS3R. Meskipun beberapa inisiatif

telah berjalan, belum ada dukungan teknis dan pemasaran hasil daur ulang yang memadai. Selain itu, lemahnya koordinasi antar level pemerintahan, terutama dalam pengalihan TPA dari Piyungan ke Nitikan, juga menunjukkan masih kurangnya integrasi kebijakan lintas sektor dan wilayah. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga kolaboratif, adaptif, dan berbasis komunitas.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Melalui evaluasi berdasarkan enam dimensi Dunn (2003), ditemukan bahwa kebijakan tersebut sudah menunjukkan progres positif dalam hal sosialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pelibatan stakeholder lokal. Namun, dimensi efektivitas, efisiensi, dan kecukupan masih menghadapi kendala serius seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan tenaga kerja, dan tidak seimbang antara volume sampah dengan kapasitas layanan yang tersedia.

Kebijakan ini juga belum sepenuhnya merata dalam penerapannya, meskipun ada upaya distribusi informasi dan fasilitas ke seluruh wilayah kelurahan. Respons masyarakat pun masih beragam; ada yang menerima dengan baik, namun sebagian masih belum memahami atau menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah. Sementara dari segi ketepatan, kebijakan belum dapat dinilai hasil akhirnya secara menyeluruh karena program masih dalam proses berjalan dan terus menyesuaikan dengan dinamika lapangan, terutama menyusul perubahan skema pengelolaan TPA oleh pemerintah provinsi.

Selain temuan utama tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan. Hambatan berupa keterbatasan dana, sarana, tenaga kerja, dan kurangnya koordinasi lintas pemerintahan menjadi tantangan utama. Namun di sisi lain, munculnya fasilitator lingkungan dan dukungan dari tokoh masyarakat menjadi modal sosial yang penting untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada integrasi kelembagaan, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, serta keberlanjutan dukungan sumber daya secara menyeluruh.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang hanya difokuskan di wilayah Kemantren Umbulharjo serta keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, sehingga belum dapat menggambarkan hasil implementasi kebijakan secara jangka panjang. Selain itu, keterbatasan dalam jumlah informan dan dinamika sosial yang terus berubah juga dapat memengaruhi kedalaman analisis terhadap respons masyarakat.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah agar dapat membandingkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah antar kemantren atau kota lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, pendekatan longitudinal juga penting dilakukan guna mengevaluasi dampak kebijakan dalam jangka panjang. Kajian mendalam terkait peran aktor non-pemerintah seperti komunitas lingkungan dan sektor swasta juga layak dikembangkan untuk melihat potensi kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kemantren Umbulharjo, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, para lurah, fasilitator lingkungan, serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kerja sama selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas

implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah Kemantren Umbulharjo.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, A. (2023). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tolitoli* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/28738>
- Budihardjo, M. A., Ardiansyah, S. Y., & Ramadan, B. S. (2022). Community-driven material recovery facility (CdMRF) for sustainable economic incentives of waste management: Evidence from Semarang City, Indonesia. *Habitat International*, *119*, 102488. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102488>
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Pearson Education.
- Fahira, R. B. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Diponegoro Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 2, No. 1, pp. 649-665). <https://mail.ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/4110>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Hulu, T. W. (2023). *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa di Desa Lehemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara*. (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/21410>
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *4*(1), 12-25. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3661>
- Kakilo, B., Igirisa, I., & Isa, R. (2023). Implementation of waste management policy in Kwandang sub-district, North Gorontalo regency. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, *20*(1), 451–457. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.1.1837>
- Kurniawan, E. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kebijakan Publik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Latanna, M. D., Gunawan, B., Franco-Garcia, L., & Bressers, H. (2023, July). Governance assessment of community-based reduction waste programs in Makassar, South Sulawesi, Indonesia. *Preprints*, 2023071727. <https://doi.org/10.20944/preprints202307.1727.v1>
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., Sulistyawati, Wahyuni, T., & Tentama, F. (2024). Community-driven waste management: Insights from an action research trial in Yogyakarta, Indonesia. *The Open Public Health Journal*, *17*. <https://doi.org/10.2174/0118749445334410241122102430>
- Mulyani, F., Frian, A., & Abdullah, T. M. K. (2024). Circular economy implementation: A case study in Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, *2*(2). <https://doi.org/10.58344/jig.v2i2.72>
- Purwanto, E. A. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Sibun, S. (2023). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3r (Reuse, Reduce, Recycle) di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram). <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/6544>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadi, D. (2019). *Analisis Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

- Tadasi, A. N. R., & Choiriyah, I. U. (2023). Role of Village Government in Waste Management in Kejaman Village, Gempol District, Pasuruan Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24, 10-21070. <https://ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1327>
- Wahdatunnisa, M. (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Lingkungan Pangandaran. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*, 9(1), 1-5. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2404>

